



Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi

Ilham Zanata¹, Yana Fajar Basori², Andi Mulyadi³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾Ilhamzanata5@gmail.com, ²⁾yanafajar@ummi.ac.id, ³⁾andimulyadi@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [31 Juli 2023]

Revised [11 November 2023]

Accepted [13 Desember 2023]

KEYWORDS

Policy Implementation, Smart Cards, Elementary School Education, Students Prone to Dropping Out of School,

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Program Kartu Cerdas adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang bertujuan memberikan dana stimulan pendidikan berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Sukabumi dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi program kartu cerdas dan faktor yang mempengaruhi program kartu cerdas dalam upaya mengurangi siswa rawan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar di Kota Sukabumi oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald van Metter dan Carl van Horn. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program kartu cerdas. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengimplementasian kartu cerdas ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn Berdasarkan 6 (enam) variabel yakni Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

ABSTRACT

The Smart Card Program is a program of the Sukabumi City Government which aims to provide educational stimulant funds in the form of scholarships to the people of Sukabumi City from economically disadvantaged groups. The purpose of this study was to determine the implementation of the smart card program and the factors that influence the smart card program in an effort to reduce students who are prone to dropping out of school at the elementary school level in Sukabumi City by the Department of Education and Elementary Schools in Sukabumi City. This study uses descriptive qualitative methods and uses the theory of public policy implementation according to Donald van Metter and Carl van Horn. Data were obtained through observation, interviews and documentation with related parties in implementing the smart card program. The procedure for testing the validity of the data is done by source triangulation. The results of this study indicate that the implementation of this smart card is in accordance with the theory put forward by Donald Van Metter and Carl Varn Horn. Executor, Inter-Organizational Communication and Implementer Activities, Economic, Social and Political Environment

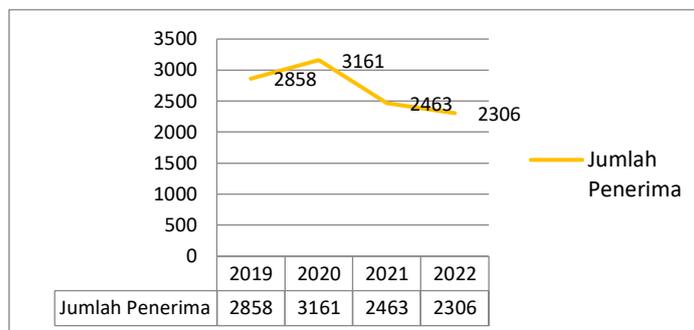
PENDAHULUAN

Program Kartu Cerdas adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang bertujuan memberikan dana stimulan pendidikan berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Sukabumi dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Kartu Cerdas adalah kartu berbentuk piagam atau sertifikat yang diberikan kepada siswa/peserta didik masyarakat Kota Sukabumi yang kurang mampu. Yaitu untuk menunjang bantuan beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah/rawan *drop out* yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

Program Kartu Cerdas ini telah memasuki tahun kesembilan yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan terutama difokuskan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, Paket A, Paket B dan Paket C karena pendidikan jenjang SMA/SMK sudah dilimpahkan ke tingkat provinsi, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dilatar belakangi banyaknya siswa di Kota Sukabumi yang mengalami rawan putus sekolah/ rawan *drop out* akibat ekonomi orang tua yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anaknya. Maka dari itu, Pemerintah Kota Sukabumi membuat Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2017 tentang "Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas". Pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota "Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera" serta menekankan kepada reformasi birokrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman

bertaqwa, berilmu serta mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang lebih baik dan berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar.

Grafik 1. Data Siswa Penerima Kartu Cerdas Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

Berdasarkan Data Grafik 1. menunjukkan masih banyaknya kondisi anak rawan putus sekolah/rawan *drop out* yang terjadi di Kota Sukabumi terutama pada jenjang pendidikan dasar, kondisi anak rawan *drop out* pada jenjang pendidikan dasar pada tahun 2019-2020 menunjukkan hasil yang meningkat, namun pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan

Berdasarkan hasil observasi awal dilapangan mengenai Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal dan Waktu Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu
1.	Persiapan (penyusunan proposal dan instrument)	Mei
2.	Sosialisasi kepada pihak sekolah	Juni-Juli
3.	Input Data	Juli s.d Agustus
4.	Validasi Data	Agustus s.d September
5.	Pengajuan Proposal dan pencairan anggaran	Oktober s.d November
6.	Penyaluran dana kepada sekolah penerima	November
7.	Pelaporan dan evaluasi	Desember

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

Berdasarkan Data Tabel 1. Terdapat permasalahan pencairan dana yang mengalami keterlambatan oleh pihak sekolah di SDN Babakan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum yang seharusnya penyaluran dana di berikan pada bulan November, akan tetapi dalam penyaluran dana kepada penerima bantuan program mengalami keterlambatan oleh pihak sekolah 1 bulan berikutnya. Dalam proses verifikasi data calon penerima kartu cerdas yang melibatkan pihak sekolah membuat celah untuk memanipulasi data oleh oknum sekolah yang tidak bertanggung jawab hal ini terbukti dengan terdapatnya penyimpangan oleh oknum kepala sekolah SDN Babakan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum yang menyelewengkan dana kartu cerdas dan dana tidak disalurkan kepada penerima program bantuan kartu cerdas sebagaimana mekanisme yang berlaku. Pihak sekolah yang seharusnya bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana bantuan kepada penerima bantuan program kartu cerdas, namun bertindak tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pengawasan dari pemerintah/dinas pendidikan selaku pelaksana program kartu cerdas harus lebih ditingkatkan agar hal serupa tidak terulang kembali.

Kurang maksimalnya sosialisasi dari pihak dinas dan sekolah selaku penyalur dana bantuan program kartu cerdas kepada masyarakat/penerima bantuan kartu cerdas dalam memberikan pemahaman yang jelas dan mekanisme yang rinci mengenai program kartu cerdas di Kota Sukabumi hal ini terlihat ketika dalam penyaluran mengalami keterlambatan dan komunikasi yang kurang antara pihak dinas pendidikan dan sekolah.



LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) diartikan beragam. Hal ini dikarenakan banyaknya dari definisi tersebut dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Menurut Dye (1995: 2) kebijakan merupakan sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baginya kebijakan adalah pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (*public policy is what ever government chooses to do ore not to do*). Defenisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Istilah kebijakan Hogwood dan Gunn, (2005:15) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik

Menurut Carl Friedrich (1969:79) kebijakan adalah:

Konsep Implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 455) dalam jurnal *The Policy Implementation process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Selanjutnya Menurut Agustino (2016: 126-129) dari buku yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik, implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan". Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Dari beberapa definisi para ahli di atas peneliti menginterpretasikan implementasi kebijakan merupakan tindakan pelaksanaan kegiatan politik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena masalah di lingkungan masyarakat yang telah diidentifikasi melalui serangkaian proses dan dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald van Metter dan Carl van Horn. penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara, focus group discussion, dan observasi. Kedua data sekunder yang didapatkan dari studi dokumentasi dan kajian pustaka, baik berupa artikel penelitian sebelumnya maupun kajian teori pendukung. Adapun dalam pengumpulan data dengan wawancara, informan dipilih dengan teknik purposive, yakni informan dipilih atas kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Sehingga informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Kepala Sekolah Dasar di Kota Sukabumi, Penerima Kartu Cerdas, dan Masyarakat umum. Data penelitian dianalisis dengan tahap-tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Salah satu variabel yang harus dipertimbangkan saat pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn, yaitu ukuran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Karena menurut teori ini, setiap pembuat atau perancang kebijakan harus dapat mengukur dan memperkirakan apakah kebijakan yang akan di terbitkan dapat sesuai dengan kapabilitas para pengguna kebijakan, karena jika suatu kebijakan dibuat bukan berdasarkan kebutuhan ataupun hanya karena ego sang pembuat kebijakan maka pada saat implementasinya tidak akan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan hasil analisis data lapangan serta terkait dengan prioritas pembangunan nasional yaitu penuntasan wajib belajar 12 tahun.

Dengan begitu untuk mengetahui lebih jelas dan tepat mengenai variabel ukuran dan tujuan kebijakan ini, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1 mereka berpendapat bahwa. Implementasi Program Kartu Cerdas ini, sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini. Kebijakan ini dibuat berdasarkan data analisis dilapangan serta amanat nasional yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, dapat peneliti interpretasikan bahwa, menurut informan 1 tujuan dari Program Kartu Cerdas ini sudah sesuai dengan permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu terkait masalah ekonomi serta menurut informan 1 Program Kartu Cerdas ini sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat berdasarkan data lapangan yang dimana pada tahun 2014-2018 tingkat siswa yang putus sekolah terutama pada jenjang sekolah dasar terus meningkat. Hal ini disebabkan salah satunya karena faktor ekonomi masyarakat yang rendah, maka dari itu tersebut dirumuskanlah kebijakan kartu cerdas ini, yang salah satunya bertujuan agar meminimalisir siswa putus sekolah karena faktor ekonomi.

Selain itu menurut informan 3 selaku dari sisi pelaksana kebijakan pun menyatakan kebijakan ini sudah sangat tepat dan berjalan dengan yang diharapkan dan banyak orangtua murid pun yang merasa terbantu akibat dari adanya kebijakan ini. Untuk itu dapat peneliti interpretasikan bahwa Kartu Cerdas ini sangat membantu bagi masyarakat Kota Sukabumi yang membutuhkan. Pernyataan informan 3 itu juga di dukung oleh infoman 4 dan 5 selaku penerima kebijakan yang mana menurutnya kartu cerdas ini sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, menurut saya kebijakan ini sudah tepat sasaran khususnya saya sebagai penerima bantuan dana dari Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan untuk kebutuhan sekolah anak saya.

Dengan begitu Berdasarkan hasil analisa wawancara dari beberapa informan tersebut, peneliti dapat interpretasikan bahwa, implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini sudah sesuai dengan variabel yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, yang mana kebijakan ini sudah tepat guna, tepat sasaran, dan sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini, yaitu dengan menurunnya tingkat rawan putus sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah dari tahun 2020-2022, serta indeks mutu pendidikan di Kota Sukabumi dari kurun 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat. Pada variabel ini, terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Ardianto: 2017, yang dimana tujuan dari pelaksanaan Program Kartu Cerdas dan Program Kartu Tangerang Pintar yang dilakukan oleh Ardianto, sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia, adapun sumber daya dana dalam implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini, sumber dana dalam Program Kartu Cerdas ini bersumber dari APBD Kota Sukabumi sebesar 20%. Dana yang diberikan bagi jenjang sekolah dasar rata-rata berkisar Rp. 700.000,00.- dan menengah sebesar Rp. 900.000,00.-, dana tersebut bisa lebih rendah atau lebih besar tergantung dengan APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, memiliki sumber daya yang mumpuni serta kompeten dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab dalam implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini. Namun masih terdapat oknum sekolah yang melakukan penyelewengan, namun oknum tersebut sudah ditindak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan diberikan sanksi tegas sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan dilapangan, para informan menyatakan terkhusus infoman 1 dan 2 bahwa mereka sepakat agar implementasi kebijakan ini sukses, sangat perlu sumber daya yang mumpuni dan berintegritas. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi membuat tim khusus untuk menjalankan kebijakan ini agar terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa adanya penyelewengan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu Sumber daya juga merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini, kami sebagai yang bertanggungjawab atas kebijakan ini membentuk tim khusus, serta selalu melakukan monitoring hingga berkordinasi dengan seluruh sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi. Selain itu kami juga memiliki tim pengawas internal maupun eksternal untuk meminimalisir kejadian salah sasaran penerima bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasinya sendiri para pelaksana kebijakan ini telah memperhatikan banya

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, peneliti menemukan bahwa, menurut informan 3 sumber daya yang dimiliki, sudah menjalankan tugas dengan amanah sesuai dengan Perwal dan SOP yang berlaku. Hal tersebut juga di tambahkan oleh informan 4 yang mana ntuk sumber



daya aparatur yang bertugas dari mulai saya pengajuan proposal hingga saat pencairan, para petugas nya ramah dan jelas dalam memaparkan apa saja langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerima Program Kartu Cerdas. Hal tersebut juga di sepakati oleh informan 5 yang menyatakan bahwa sudah seharusnya sumber daya manusia yaitu para petugas Program Kartu Cerdas ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawabnya masing-masing.

Berdasarkan hasil analisa wawancara dari beberapa informan dapat peneliti interpretasikan bahwa, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sudah mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan, meskipun pada awal pemberlakuan Program Kartu Cerdas ini masih terdapat oknum sekolah yang melakukan penyelewengan namun hal tersebut segera diselesaikan oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi juga sudah membuat tim khusus, serta berkoordinasi langsung dengan seluruh sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi, dan memiliki tim pengawas internal maupun eksternal untuk mengawasi implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini agar sesuai dengan tujuan kebijakan Program Kartu Cerdas ini. Pada variabel ini, terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu sumber daya yang menunjang program ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana pada implementasi Program Kartu Cerdas melaksanakan mandatnya rasa penuh tanggungjawab. Penyaluran dana sudah sesuai yang diamanatkan dalam Perwal Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para infoman yakni informan 1,2 dan 3 bahwa dari sisi sebagai pelaksana kebijakan ini, memiliki komitmen yang dimana setiap ada pelanggaran ataupun ketidaksesuaian dengan yang semestinya, kami akan bersikap tegas. Karena ada beberapa masyarakat yang mengajukan proposal dan persyaratan yang tidak lengkap, mereka tidak menerima dan membentak petugas pelayanan, maka kami pun tetap akan bersikap tegas agar semua penerima Program Kartu Cerdas ini dapat tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya Setiap hari sebelum melakukan pelayanan, melakukan briefing kepada semua petugas pelayanan, yang dimana tujuan dari briefing ini untuk memastikan komitmen kami, yaitu "SIAP MELAYANI" yang artinya SIAP untuk bersikap dan bertutur kata yang ramah dalam melayani masyarakat, SIAP melakukan inovasi dibidang pelayanan pendidikan, SIAP melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, SIAP memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya para pelaksana kebijakan ini selalu dihimbau dan diingatkan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi jika ada masyarakat yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami pun akan bersikap tegas.

Selanjutnya dari sisi penerima kebijakan yakni informan 4 dan 5 menyatakan bahwa sebagai penerima dari Program Kartu Cerdas ini diberikan pelayanan yang ramah serta sopan oleh para petugas. Para petugas pelayanan baik dari Dinas Pendidikan maupun petugas di sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Artinya para penerima kebijakan ini sudah merasakan puas akan pelayanan dari para pelaksana kebijakan mau dari pihak Dinas pendidikan ataupun dari pihak sekolah.

Berdasarkan hasil analisa wawancara dari beberapa informan, peneliti dapat interpretasikan bahwa, para petugas yang diberi mandat untuk melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kegiatan penyelewengan. Pada variabel ini, terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu karakteristik agen pelaksana pada Program Kartu Cerdas dan petugas Kartu Cerdas sudah sesuai teori menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Para Pelaksana Kebijakan dalam hal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menerima baik atas Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas ini, karena Program ini tentu selaras dengan motto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yaitu SIAP MELAYANI dan SIAP MENCERDASKAN. Berdasarkan hasil wawancara terkhusus dengan infoman 1,2, dan 3 selaku bagian dari pelaksana kebijakan menjelaskan bahwa dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi mendukung serta berperan aktif dalam kebijakan ini untuk mencapai tujuan yang telah di amanatkan pada Perwal Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas.

Selanjutnya para informan juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentu merasa terbantu dengan adanya kebijakan Program Kartu Cerdas ini, khususnya untuk

menyelaraskan dengan salah satu motto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yaitu SIAP MENCERDASKAN. Dan kami sebagai dinas yang mengurus pada bidang pendidikan selalu mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sukabumi. dengan demikian sikap dan kecenderungan para pelaksana ini sangat mendukung dan mengupayakan yang terbaik dalam memberikan layanan dari kartu cerdas ini agar dapat membantu menurunkan angka rawan putus sekolah.

Terlebih berdasarkan penuturan informan 4 dan 5 sebagai penerima kebijakan, mereka merasakan pelayanan yang diberikan petugas sangat baik dan ramah, dari hal tersebut terlihat sikap mereka mendukung adanya Program Kartu Cerdas ini. Para petugas juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik sehingga berdasarkan observasi dilapangan tersebut peneliti dapat meninterpretasikan bahwa para sikap para sangat mendukung kebijakan ini dan melaksanakan kebijakan ini dengan semestinya.

Berdasarkan hasil analisa wawancara dari beberapa informan, dapat peneliti interpretasikan bahwa seluruh pelaksana Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas sangat mendukung baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi maupun pihak sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi. Pada variabel ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu semua pihak baik petugas maupun penerima Program Kartu Cerdas maupun Program Kartu Tangerang Pintar mendukung kebijakan ini, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dengan seluruh sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi terjalin dengan baik dengan dibuktikan dengan membuat tim khusus yang anggotanya terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan juga pegawai sekolah dasar dan menengah. Selain itu koordinasi juga dilakukan kepada para siswa dan orangtua murid oleh pihak sekolah sekaligus melakukan sosialisasi Program Kartu Cerdas. Untuk lebih memperjelas pembahasan ini, peneliti sudah melakukan wawancara kepada beberapa informan dan menanyakan pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan informan 1,2 dan 3 Koordinasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas ini, karena jika tidak ada koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dengan para *stakeholder* maka tidak akan adanya sinkronisasi, maka akan terjadinya miss komunikasi yang dapat berakibat pada masalah pada data maupun hal penting lainnya. Koordinasi ini juga pastinya bukan hanya koordinasi antara pimpinan dan bawahan tapi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat seperti pihak sekolah dan para penerima kartu cerda ini. Karena koordinasi tersebut sangat penting menjadi pilar untuk keberhasilan kebijakan ini, untuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sendiri, tidak hanya pada kebijakan ini saja, namun setiap hal apapun yang menyangkut tupoksi dan tujuan organisasi pasti dilakukan koordinasi. Selain itu informan 4 dan 5 sepakat bahwa koordinasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada kami telah berjalan dengan baik meskipun pada awal adanya Program Kartu Cerdas ini, sosialisasinya terhitung kurang.

Berdasarkan hasil analisa wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat interpretasikan bahwa koordinasi merupakan dasar yang penting untuk sebuah organisasi dalam menjalankan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sesuai tujuannya. Pada variabel ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, bahwa pelaksanaan Program Kartu Cerdas dan Program Kartu Tangerang Pintar sudah sesuai dengan teori menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Variabel terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas lingkungan eksternal. Dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas pendanaan dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tidak kurang dari 20% APBD Kota Sukabumi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan ini yaitu faktor ekonomi dan soaial penerima Program Kartu Cerdas yang dimana para penerima bantuan berebut untuk melakukan pengajuan proposal untuk mendapatkan Kartu Cerdas.



Pada variabel ini berdasarkan informan 1 kartu cerdas ini tentu didukung oleh berbagai pihak terkait, baik dari segi pendanaan, pelaksanaan, hingga pencairan. Anggaran kebijakan ini bersumber dari APBD Kota Sukabumi, adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan ini yaitu faktor ekonomi dan sosial yang mana masyarakat kurang mampu berlomba-lomba untuk mendapatkan Kartu Cerdas ini. Hal tersebut berarti bahwa, pelaksanaan Program Kartu Cerdas ini di danai oleh APBD Kota Sukabumi, dan faktor eksternal yang dapat berpengaruh dalam kebijakan ini yaitu ekonomi dan sosial masyarakat yang terbelah rendah. Selain itu menurut informan 2 pelaksanaan Implementasi Kebijakan ini bisa berhasil bukan peran pemerintah Kota Sukabumi sendiri namun melainkan para *stakeholder* pun ikut mendukung kebijakan ini.

Selain itu berbicara mengenai lingkungan sosial peran aktif masyarakat juga sebagai penerima bantuan juga sangat besar dengan membantu mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat lainnya yang sesuai dengan ketentuan Program Kartu Cerdas ini. Informan 3 mengatakan bahwa keberhasilan program ini merupakan salah satu kolaborasi antara pelaksana kebijakan dan penerima bantuan untuk mensosialisasikan program ini. Selanjutnya informan 4 dan 5 menambahkan bahwa mereka sangat mendukung kebijakan ini, karena sebagian dari kami berasal dari kalangan ekonomi yang menengah kebawah, kami pun membantu menyebarkan kebijakan Program Kartu Cerdas ini kepada masyarakat yang membutuhkan lainnya.

Berdasarkan hasil analisa wawancara dari beberapa informan dapat peneliti interpretasikan bahwa faktor internal yang memadai yaitu pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi, selain itu faktor eksternal yaitu faktor ekonomi dan sosial menjadi hal yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan status sosial yang rendah berlomba-lomba untuk mendapatkan Kartu Cerdas, namun ketika para *stakeholder* tidak ikut serta maka implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini hanya sebuah produk politik yang hanya berisi kalimat hukum didalamnya. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu dalam kedua penelitian ini, faktor ekonomi dan sosial menjadi faktor eksternal utama dalam penyelenggaraan kebijakan program ini, karena tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah dan keadaan sosial yang kurang baik untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi kebijakan serta penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya, mengenai Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 6 (enam) variabel diatas yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, sudah sesuai dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sudah berhasil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas untuk menurunkan angka rawan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan menengah serta meningkatnya indeks mutu pendidikan di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas masih terdapat faktor penghambat, yaitu sumber daya manusia yang kurang mumpuni, masih terdapatnya oknum sekolah yang melakukan penyelewengan agar masyarakat yang diluar ketentuan bisa mengajukan proposal Program Kartu Cerdas, dan masih terdapat beberapa sekolah yang masih belum melakukan sosialisasi kepada para siswa dan orang tua murid.
3. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas masih terdapat faktor pendukung, yaitu tingkat partisipasi masyarakat pada kebijakan ini sungguh tinggi, sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu merespon cepat ketika ada tindak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, dan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan para *stakeholder*.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang perlu di kemukakan serta menjadi rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dengan alternatif implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas di Kota Sukabumi.

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan dilakukan penelitian lanjutan mengenai Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi dengan berdasarkan teori selain dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn untuk menggali informasi lebih komprehensif dari sudut pandang teori lain.

2. Aspek Praktis

- 1) Untuk dapat meminimalisir kegiatan penyelewengan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas, dilakukannya sistem digitalisasi dari awal mulai pelaporan proposal hingga penyaluran dana.
- 2) Untuk menunjang digitalisasi diperlukan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara penggunaan sistem digital untuk mengajukan beasiswa Program Kartu Cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Anggi. 2017. *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi Dki Jakarta: Peluang Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 12 No. 1, hal 55-68.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Creswell, C. John. 2016 *Research Design* Edisi 4. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Ghony, M. Dhunaedi & Almanshur, Fauzan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Hogwood, B.W. dan L.A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real Word*. Oxford University Press.
- Maulana, Yogi Sugiarto. 2017. *Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar*. JIPE Vol. 1 No. 2, hlm 203-213.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Satori Djam'an, Komariah Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Tim Dosen Ilmu Administrasi Publik. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi, Laporan Ristik dan Jurnal Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Van Meter, Donald S dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation process: A Conceptual Framework*. Sage Publications Inc, Vol 6 No.4, p 445 – 488.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.